

## Hambatan Adaptasi Mata Pencarian Kelompok Rentan Dalam Relokasi Masyarakat Pesisir KEK Mandalika

Anisa Puspa Rani<sup>1</sup>, Siti Nurjanah, Saipul Hamdi, Dwi Setiawan Chaniago, & Sally Salsabila

Universitas Mataram, Indonesia

### **Abstract**

*Vulnerable groups at the margins of development are often the most affected in the development process. The development of the Mandalika area as a new tourism center exposes vulnerable groups to situations that require them to be able to adapt to the development of tourism economic activities in the region. This study aims to examine the obstacles to livelihood adaptation of vulnerable groups in relocation due to the development of the Mandalika Tourism Area. This research is case study research with a qualitative approach. Theoretically, in one spectrum, this research uses a political economy perspective as an alternative in understanding the dynamics of vulnerable groups of coastal communities who are relocated due to the infiltration of ongoing tourism development in the Mandalika Special Economic Zone. This research found a number of obstacles in the process of adapting the livelihoods of vulnerable groups, namely related to the protracted relocation process, the economic value in land and settlement compensation is small, relocation is oriented towards resettlement rather than socio-economic recovery of the community and the characteristics of jobs available in the area have not favored the needs of vulnerable groups. This research sees that there are differences in the pace of economic development and social development where state intervention in supporting regional operations is still concentrated on infrastructure development in stimulating business activities for the needs of the tourism economy. Meanwhile, social development, especially interventions to support economic recovery and adapt the livelihoods of vulnerable groups, has not yet become the main discourse in supporting the economic transformation of local communities.*

**Keywords:** *Adaptation Barriers, Livelihoods, Vulnerable Groups*

### **Abstrak**

Kelompok rentan sebagai lini paling pinggir dalam pembangunan seringkali terdampak paling besar dalam proses pembangunan. Perkembangan Kawasan Mandalika sebagai pusat pariwisata baru menghadapkan kelompok rentan dalam situasi yang menuntut mereka untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan aktivitas ekonomi pariwisata di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan adaptasi mata pencaharian kelompok rentan dalam relokasi akibat pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara teoritis, dalam satu spektrum penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik sebagai alternatif dalam memahami dinamika kelompok rentan masyarakat pesisir yang direlokasi akibat infiltrasi pembangunan pariwisata yang sedang berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan dalam proses adaptasi mata pencaharian kelompok rentan yakni terkait proses relokasi yang berlarut-larut, nilai ekonomi dalam Kompensasi lahan dan pemukiman yang kecil, relokasi yang berorientasi pada pemukiman kembali dibandingkan pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta karakteristik pekerjaan yang tersedia di kawasan belum berpihak pada kebutuhan kelompok rentan. Penelitian ini melihat bahwa adanya perbedaan laju pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dimana intervensi negara dalam mendukung operasional kawasan masih terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dalam menstimulasi aktivitas pelaku usaha untuk kebutuhan ekonomi pariwisata. Sedangkan pembangunan sosial khususnya intervensi dukungan pemulihan ekonomi dan adaptasi mata pencaharian

---

<sup>1</sup>anisapusparani@unram.ac.id

kelompok rentan masih belum menjadi wacana utama dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Hambatan Adaptasi, Mata Pencaharian, Kelompok Rentan

## **Pendahuluan**

Kebermanfaatan ekonomi dalam pembangunan di sektor pariwisata merupakan salah satu kajian yang menjadi perhatian para peneliti dan akademisi. Dalam perspektif ekonomi kebermanfaatan pembangunan pariwisata lebih menekankan pada manfaat di sektor dunia usaha dan korporasi. Beberapa kajian dengan perspektif ekonomi mengungkapkan kebermanfaatan pembangunan di sektor pariwisata berdampak pada korporasi dan pengembang pariwisata (Feng, 2008), mendorong pertumbuhan bisnis dan pelaku usaha pariwisata lokal (Kokkranikal & Morrison, 2002; Zebryte & Jorquera 2017), manfaat di sektor korporasi akomodasi (Davidson & Sahli, 2014), manfaat bagi perusahaan multinasional (Burns, 2008) serta manfaat pariwisata bagi asosiasi industri dan korporasi yang mewakili sektor ekonomi pasar (Gleckman, 2018). Dalam perspektif ekonomi khususnya dunia usaha, kebermanfaatan ekonomi dalam pembangunan pariwisata dikaitkan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, tawaran lapangan pekerjaan serta manfaat lain yang menyertai *trickle down effect* dari pembangunan pariwisata.

Perspektif ekonomi dalam pembangunan pariwisata berdampak pada pendekatan pembangunan yang berbasis pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam pendekatan yang berbasis pertumbuhan ekonomi, pembangunan pariwisata diarahkan pada pertumbuhan makro ekonomi yang bersandar pada peningkatan produk domestik bruto, jumlah wisatawan, konsumsi pemerintah, penerimaan devisa, dan peningkatan investasi modal (Isik, 2015). Untuk mencapai tujuan makro ekonomi, pemerintah cenderung berafiliasi dan memfasilitasi sektor dunia usaha dan korporasi dalam menggerakkan perputaran ekonomi dalam aktivitas pariwisata. Dalam perspektif negara, pembangunan pariwisata dianggap penting sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan devisa (Okello & Novelli, 2014), serta menyediakan lapangan pekerjaan (Ketshabile & Ferreira, 2019).

Penguatan kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal merupakan isu penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Cheung, dkk 2017). Beberapa penelitian mendokumentasikan arti penting pembangunan yang berorientasi pada masyarakat lokal memiliki dampak positif seperti peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup (Cooper & hall, 2016; Rodrigues & Prideux 2017) dan memunculkan diversifikasi mata pencaharian khususnya usaha di bidang pariwisata (Snyman, 2014; Iorio & Corsale, 2013). Kendati demikian pada praktiknya upaya memperluas manfaat ekonomi dalam pembangunan pariwisata untuk masyarakat memiliki sejumlah tantangan seperti faktor baik dalam hal *management stakeholder* (Wondirad dan Ewnetu, 2019), kondisi pendidikan formal, adaptasi untuk diversifikasi mata pencaharian dan akses pekerjaan yang terbatas (Snyman, 2014), belum memadainya relasi kekuasaan antara aktor eksternal dan masyarakat lokal (Sakata & Prideaux, 2013), serta keterbatasan sumberdaya modal untuk akses ekonomi di sektor pariwisata (Troung,

dkk 2014). Kondisi tersebut seringkali mereduksi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal sebatas pada akses lapangan pekerjaan saat proyek pembangunan berlangsung.

Kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal seringkali menemui tantangan seiring dengan proses relokasi yang menyertai proses pembangunan di sektor pariwisata. Para peneliti dan akademisi cenderung terpecah dalam menyikapi proses relokasi yang menyertai proses pembangunan pariwisata. Dalam pemikiran yang cenderung optimis beberapa peneliti mengungkapkan manfaat ekonomi dalam proses relokasi masyarakat lokal di kawasan pariwisata dapat berhasil tanpa menghancurkan entitas budaya dan endemitas lokal dengan kebijakan pemangku kepentingan yang tepat (Jiu-Xia & Tao, 2012), desain dan misi organisasi peran pemangku kepentingan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal (Wasylycia & Leis, 2016) serta jaminan mata pencaharian baru dari pemerintah (Chengzhao, dkk 2020). Sedangkan peneliti yang skeptis mengungkapkan dampak sosial dan ekonomi relokasi masyarakat lokal dapat menciptakan marginalisasi bagi masyarakat lokal yang gagal beradaptasi dan kehilangan mata pencaharian (Zuan Ou & Guaqing Ma, 2017). Selain itu, relokasi hampir selalu memiliki sejumlah tantangan seperti penolakan dikarenakan ketidakrelaan kehilangan lahan dan rasa ketidakpercayaan pada pemerintah lokal (Lora & Wainwright, 2014) serta kekhawatiran terhadap akses pekerjaan dan pengembangan kapasitas (Su & Geoffrey, 2005).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi kerangka kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 sebagaimana diagendakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerangka ini juga diimplementasikan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) kawasan bekerjasama dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) selaku lembaga pembiayaan pembangunan proyek *Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project* (MUTIP) menyusun kerangka *Indegeneous People Development Project* (IPDP). IPDP merupakan salah satu bentuk komitmen penerapan prinsip *Leave No One Behind* (LNOB) dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Leave No One Behind* dalam pembangunan pariwisata Lombok merupakan wacana yang menarik mengingat beberapa penelitian telah mendokumentasikan proses pembangunan pariwisata Lombok seringkali memunculkan dinamika konflik lahan antara masyarakat dan investor maupun (Fallon, 2001; Fallon, 2015), hambatan ekonomi bagi masyarakat lokal (Schellhorn, 2010) serta dominannya agenda internasional dalam pembangunan pariwisata lokal Lombok (Hampton & Jeyacheya, 2015). Implementasi IPDP perlu ditelusuri lebih jauh khususnya terkait dengan proses adaptasi mata pencaharian kelompok rentan akibat relokasi 135 kepala keluarga dalam pembangunan kawasan *sport and entertainment* di KEK Mandalika. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hambatan adaptasi mata pencaharian kelompok rentan dalam relokasi pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kelompok rentan dari masyarakat lokal di Dusun Bunut dan Dusun ujung Lauk yang terdampak relokasi akibat pembangunan distrik *sport and entertainment* di KEK Mandalika. Pendekatan kualitatif yang dipergunakan sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi perspektif individu sebagai makhluk sosial yang berpengetahuan dan berpengalaman yang unik dalam memaknai aktivitas dan lingkungan sosialnya. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu memperkuat perspektif kelompok rentan dalam “dunia sosialnya”. Pendekatan tersebut dipadukan dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti mendalami realitas dengan intensitas kasus yang spesifik dalam memaknai dinamika adaptasi ekonomi dan sosial, hambatan mata pencaharian serta potensi ekonomi dan sosial kelompok rentan dalam pemulihan ekonomi pasca relokasi.

Basis data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan masyarakat lokal dengan kriteria khusus kelompok rentan yang sudah pindah dan menempati rumah relokasi permanen yang disediakan di Dusun Ngolang. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan hasil verifikasi penerima rumah hunian relokasi yang mengacu pada *Resettlement Policy Framework of The Mandalika Urban and Tourism Project*. Data dikumpulkan dari 12 orang informan kelompok rentan berbasis gender yang terdiri dari 4 orang perempuan lanjut usia dan janda, 3 remaja perempuan putus sekolah, dan 3 orang dari kelompok ekonomi lemah.

Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik sebagai alternatif dalam memahami dinamika kelompok rentan masyarakat pesisir yang direlokasi akibat infiltrasi pembangunan pariwisata yang sedang berlangsung. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang berorientasi pada interpretasi teoritik dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik Marxian yang menekankan pada kelas, keberpihakan dan keadilan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 2014). Data disajikan dalam tiga titik diskursus yakni adaptasi ekonomi dan sosial kelompok ekonomi rentan, hambatan mata pencaharian dan potensi ekonomi sosial yang dimiliki serta pendekatan institusional dalam penguatan ekonomi kelompok rentan berbasis gender.

## Hasil Dan Pembahasan

### Perubahan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Lokal di Kawasan

Masyarakat Lokal dalam 10 tahun terakhir menghadapi situasi perubahan lingkungan ekonomi dan sosial seiring dengan ditetapkannya Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Destinasi Super Prioritas. Apalagi sejak kawasan *sport and entertainment* dikembangkan dan beroperasi melalui sejumlah *Event* Nasional dan Internasional turut mengubah pola aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan. Masyarakat lokal dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk dapat beradaptasi seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial akibat pengembangan kawasan pariwisata. Penelitian ini melihat bahwa kelompok rentan merupakan tipologi masyarakat lokal yang paling terdampak pada aktivitas perkembangan

ekonomi pariwisata di kawasan. Selain keterbatasan dalam alternatif mata pencaharian dan kepemilikan sumberdaya potensial, kelompok rentan juga cenderung terabaikan dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi pariwisata namun belum optimal dalam mendorong transformasi ekonomi masyarakat lokal khususnya dari kelompok rentan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius mengingat kegagalan proses adaptasi dapat menyebabkan marginalisasi bagi masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian (Zuan Ou & Guaqing Ma, 2017).

Penelitian ini melihat setidaknya terdapat empat dinamika penyebab perubahan aktivitas ekonomi di KEK Mandalika. *Pertama*, perubahan dalam konteks tata kelola kawasan pariwisata. Sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu dengan format Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Mandalika dikendalikan langsung oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yakni pihak *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC). Pendelegasian pembangunan kawasan kepada ITDC dikarenakan status badan usaha sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) lahan kawasan. Peran BUPP tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK yang saat ini telah direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 40 Tahun 2021. Lebih jauh peran Badan Usaha Pembangun dan Pengelola kembali diperluas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yakni tidak terbatas pada pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan namun juga sebagai penyelenggara dan pengelola pelayanan sarana dan prasarana pelaku usaha serta penyelenggaraan promosi. Perubahan dalam konteks tata kelola kawasan pariwisata tersebut turut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat lokal seiring dengan penataan, penertiban dan pembangunan kawasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat lokal di kawasan. yang menjadi agenda pariwisata internasional. Kasus pengembangan kawasan pariwisata mandalika ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa dalam pengembangan pariwisata di Pulau Lombok masih didominasi agenda internasional dalam tata kelola dan pembangunan pariwisata lokal (Hampton & Jeyacheya, 2015).

*Kedua*, perubahan dinamika peran pemerintah daerah dalam kegiatan fasilitasi dan upaya mengakomodir pelaku usaha di kawasan. Pendelegasian pengelolaan kawasan oleh Pemerintah Pusat kepada BUPP selaku pemegang HPL mereduksi sejumlah kewenangan administratif pemerintahan daerah. Dalam pengembangan aktivitas pelaku usaha di kawasan, BUPP secara institusional dan imperatif didukung oleh struktur kelembagaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK). Keberadaan DNKEK sebagai kumpulan eksekutif lintas kementerian menjadi basis utama dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi dalam tata kelola pelaku usaha di kawasan. Hal ini turut berdampak pada peran pengaturan kewilayahan pemerintah daerah yang berkurang karena secara khusus pengaturan aktivitas ekonomi di kawasan mengacu pada peraturan pemerintah pusat maupun DNKEK. Situasi ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, pengelolaan Kawasan Mandalika yang dikendalikan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola untuk segmentasi pariwisata eksklusif turut membatasi peran pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal.

*Ketiga*, operasional KEK Mandalika dan operasional *Event* di Sirkuit Mandalika turut mengubah orientasi aktivitas pelaku usaha di kawasan. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan aktivitas utama di sektor pariwisata, KEK Mandalika diperuntukkan pada segmentasi pasar pariwisata eksklusif. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah *event* internasional seperti Ajang MotoGP dan *World Superbike*. Karakteristik ini turut berdampak pada corak aktivitas pelaku usaha yang menyerap sektor-sektor ekonomi strategis yang terstandarisasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan aksesibilitas ekonomi masyarakat lokal yang sebagian besar bergerak di sektor aktivitas ekonomi rumah tangga (*livelihood activities*), *micro enterprise* dan *small dynamic enterprise*. Sektor usaha masyarakat di Lombok Tengah umumnya terkategori sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Tengah terdapat 20.011 UMKM. Mayoritas dari jumlah tersebut merupakan usaha ultra mikro dengan besaran modal di bawah Rp.10.000.000. Sedangkan di Kecamatan Pujut yang merupakan kecamatan dimana KEK Mandalika beroperasi di tahun 2022 terdapat 1.641 UMKM. Besarnya jumlah pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi rumah tangga ini merupakan tantangan besar dalam transformasi ekonomi masyarakat agar dapat memperoleh kebermanfaatannya dalam perkembangan aktivitas ekonomi pariwisata di kawasan.

*Keempat*, pembangunan Sirkuit Mandalika di distrik *Sporttainment* KEK Mandalika secara langsung berdampak pada 135 kepala keluarga yang direlokasi. Relokasi tersebut tidak hanya menimbulkan tantangan dan dinamika dalam penyediaan rumah tempat tinggal masyarakat yang tergusur. Lebih jauh, persoalan relokasi membawa implikasi pada perubahan aktivitas perekonomian masyarakat seiring dengan perubahan permukiman. Salah seorang informan mengungkapkan informasi sebagai berikut.

*“Dulu lahan saya dan keluarga itu tidak banyak, sekitar 15 are, dari lahan itu saya bisa tanam kacang, jagung, dan lain-lain. saya juga bisa beternak sapi dan dari hasil bekebun saya bisa kumpulkan modal untuk saya dan anak-anak sambil berjualan pakaian di pinggir pantai setelah dia pulang sekolah. Di rumah karena dekat jalan menuju pantai, istri saya juga buka warung. Sekarang lahan sudah tidak ada, berjualan warung ditempat relokasi tidak bisa karena sepi, ternak juga dikandangkan jadi saya harus cari rumput keluar karna kalau dikawasan kita ditegur satpam” (TO, Masyarakat Lokal).*

Kondisi serupa juga seperti diungkapkan oleh informan berikut.

*“Dulu saya buka warung depan rumah, bisa bikin kue makanan dan lain-lain, disana karena dipinggir jalan dekat pemukiman jadi malampun ada aja yang belanja. Jadi pemasukan mudah dan saya bisa membantu suami saya yang bekerja. Setelah pindah disini saya tidak jualan lagi, karena jualan waktu WSBK itu rugi tidak ada yang beli, jadi sekarang yang kerja hanya suami, itupun pekerjaan musiman jadi satpam saat WSBK itu” (IR, Masyarakat Lokal).*

Dari beberapa ungkapan informan tersebut dapat diketahui bahwa relokasi menimbulkan tantangan adaptasi mata pencaharian. Karakteristik masyarakat yang sebagian besar mengandalkan lahan-lahan di sekitar pemukiman tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan

subsistensi keluarga. Berubahnya lingkungan fisik tempat tinggal maupun perkembangan aktivitas ekonomi pariwisata menuntut kebutuhan transformasi masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perubahan aktivitas pelaku usaha di kawasan. Meskipun perkembangan aktivitas pelaku usaha di kawasan cukup baik namun bagi sebagian besar masyarakat yang direlokasi khususnya dalam komposisi demografi terkategori sebagai kelompok rentan seperti kelompok ekonomi lemah, janda dan lansia justru memiliki tantangan yang lebih besar untuk dapat beradaptasi akibat perubahan aktifitas ekonomi di kawasan.

### **Hambatan dalam Pemulihan Mata Pencarian Kelompok Rentan**

Berdasarkan *Resettlement Policy Framework of The Mandalika Urban and Tourism Project*, masyarakat terdampak proyek pembangunan diklasifikasikan dalam 4 kategori yakni pemilik tanah *enclave*, penggugat lahan kawasan di pengadilan, pihak yang mengklaim lahan dan penduduk yang memanfaatkan lahan yang HPLnya dikuasai oleh BUPP. Penelitian ini berfokus pada masyarakat lokal pemilik tanah *enclave* dan masyarakat lokal yang memanfaatkan lahan HPL yang dikuasai oleh BUPP. Kedua, kategori ini memiliki tantangan dan hambatan pemulihan ekonomi yang berbeda berdasarkan dinamika pembebasan lahan dan proses relokasi. Situasi hambatan dalam pemulihan mata pencarian pada kelompok rentan diungkap salah seorang informan berikut.

*“Memang masyarakat kita perlu dipersiapkan lagi, apalagi jika kita bicara usaha makanan tentu standar kebersihan dan lain sebagainya perlu kita persiapkan, apalagi untuk UMKM yang terlibat dalam event kita akan seleksi, karena dinas akan melakukan kurasi bagi UMKM lokal yang ingin terlibat dan kita juga aktif lakukan pelatihan dan pembinaan karena usaha lokal masyarakat kita itu ada di sektor food and beverage” (MAR, Wawancara Juni 2024).*

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan ekonomi dalam pemulihan mata pencarian pada masyarakat dan kelompok rentan yang direlokasi. Hambatan tersebut yakni proses relokasi yang berlarut-larut dalam jangka waktu panjang, nilai ekonomi yang diperoleh dari kompensasi relokasi lebih kecil dibandingkan besaran kebutuhan ekonomi untuk adaptasi mata pencarian rumah tangga yang semula berada di sektor pertanian ke sektor pariwisata, relokasi berorientasi pada pemukiman kembali bukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan karakteristik peluang ekonomi baru di kawasan yang belum berpihak pada kelompok rentan.

*Pertama* berkaitan dengan proses relokasi yang berlarut-larut dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pembangunan Sirkuit Mandalika di distrik *sport and entertainment* misalnya, setidaknya terdapat 135 kepala keluarga yang terdampak (*project affected people*) yang harus direlokasi. Proses relokasi dimulai sejak akhir 2019 hingga tahun 2024 secara bertahap. Meskipun rencana pemukiman kembali (*resettlement plan*) dibuat diawal masa pembangunan fisik, namun pada prosesnya berlangsung secara bertahap yakni dimulai dari pemindahan masyarakat lokal dari Dusun Bunut dan Dusun Ujung Lauk ke tempat relokasi sementara (*temporary evacuation shelter-TES*) di wilayah hak pengelolaan nomor 94 (HPL 94) yang dikelola oleh Badan Usaha Pembangunan

dan Pengelola (BUPP). Proses ini dimulai sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2023. Sedangkan proses relokasi dari TES atau yang disebut warga dengan Dusun Bunut Hijrah ke tempat relokasi permanen di Dusun Ngolang mulai dilakukan sejak akhir 2023 hingga 2024. Panjangnya proses relokasi tersebut menciptakan hambatan baik secara ekonomi dan sosial karena dalam periode panjang tersebut masyarakat cenderung berada dalam situasi ketidakpastian yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses adaptasi ekonomi masyarakat lokal.

*Kedua*, hambatan ekonomi dalam pemulihan mata pencaharian kelompok rentan muncul akibat nilai manfaat yang diperoleh dari Kompensasi relokasi lebih kecil dibandingkan besaran kebutuhan ekonomi untuk adaptasi dan perbaikan ekonomi rumah tangga. Bagi masyarakat yang direlokasi uang Kompensasi yang diperoleh tidak memadai untuk membeli lahan baru dengan kuantitas dan kualitas yang serupa. Masyarakat yang direlokasi umumnya mendapatkan Kompensasi ganti rugi lahan dengan kisaran nilai variatif mulai dari Rp. 60.000.0000/are sampai Rp. 80.000.000/are tergantung lokasi tanah. Bagi kelompok masyarakat lokal yang memperoleh ganti rugi lahan jika ingin mempertahankan kepemilikan aset berupa lahan harus membeli lahan yang berada di perbukitan yang jauh dari areal kawasan pemukiman.

Lingkungan fisik kawasan yang berkembang menjadi pusat pariwisata mengakibatkan harga lahan di lingkaran kawasan menjadi tinggi. Bagi masyarakat yang ingin memiliki lahan di sekitar kawasan pariwisata sangat mustahil karena nilai jual yang diperoleh dari Kompensasi lahan di kawasan yang mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diakui warga tidak berbanding lurus dengan harga ekonomis lahan di tingkat masyarakat. Situasi tersebut disikapi dengan cara membeli tanah di luar desa yang berada di luar kawasan pariwisata. Sejumlah masyarakat yang memperoleh ganti rugi lahan berusaha membeli lahan pertanian di kawasan perbukitan yang jauh dari jalur pariwisata agar tetap bisa memiliki dan mengolah lahan pertanian.

Situasi kesulitan dalam adaptasi mata pencaharian tersebut juga dirasakan oleh penduduk yang memanfaatkan lahan HPL yang dimiliki oleh BUPP. Tipologi ini merupakan jumlah dominan masyarakat terdampak yang proses adaptasi ekonomi pasca relokasi memiliki tantangan terbesar. Kelompok ini rentan secara ekonomi dan sosial karena aktivitas mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan subsistensi dipenuhi dari pemanfaatan lahan. Kelompok ini mengalami desakan ekonomi yang besar baik pada saat relokasi di TES maupun ketika telah berada di tempat relokasi permanen akibat kehilangan sumber penopang kebutuhan subsistensi rumah tangga. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik pemenuhan subsistensi pra relokasi dimana kelompok masyarakat ini memanfaatkan lahan di kawasan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan.

*Ketiga*, relokasi masih berorientasi pada pemukiman kembali masyarakat dan belum mengarah pada pemulihan sosial ekonomi. Sejauh ini, proses relokasi yang berlangsung masih terkonsentrasi pada upaya pemberian rumah tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Meskipun proses perumahan kembali telah menunjukkan dimensi keberpihakan dengan turut memberikan rumah permanen bagi masyarakat terdampak baik yang memiliki lahan maupun hanya sebatas pemanfaat lahan kawasan. Namun demikian, proses pemukiman idealnya tidak hanya terhenti pada pemukiman namun juga rehabilitasi mata pencaharian masyarakat yang mengalami perubahan seiring dengan situasi hilangnya basis penopang kebutuhan subsistensi.

Meskipun sejumlah masyarakat memperoleh ganti rugi lahan dan memperoleh bantuan rumah di lokasi relokasi, namun persoalan utama terletak pada karakteristik pemanfaatan lahan pertanian dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan tempat tinggal. Hal ini menjadi prinsip penting bagi kelompok tersebut untuk dapat menunjang subsistensi maupun meminimalisir pengeluaran rumah tangga. Pasca relokasi, karakteristik tersebut turut berubah dan berkembang menjadi hambatan baru dalam pemulihan perekonomian mereka. Hal tersebut disebabkan lokasi rumah relokasi dan lahan yang menjadi tempat aktivitas ekonomi terpisah. Selain itu, jumlah terbesar masyarakat terdampak yang merupakan pemanfaat lahan kawasan untuk aktifitas pertanian subsisten ketika mereka direlokasi kehilangan sumber penghidupan subsisten mereka. Yang menjadi pembeda antara pemukiman masyarakat pra relokasi dengan setelah relokasi terletak pada lingkungan fisik di tempat relokasi permanen yang belum menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan subsistensi masyarakat.

Dinamika relokasi pada kelompok rentan di Kawasan Mandalika ini berkontribusi pada kajian relokasi masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan pariwisata dimana keberhasilan relokasi tidak hanya dilihat dari proses adaptasi mata pencaharian (Zuan Ou & Guaqing Ma, 2017), lahan pengganti dan rasa percaya pada pemerintah lokal (Lora & Wainwright, 2014), maupun akses pekerjaan dan pengembangan kapasitas (Su & Geoffrey, 2005). Untuk mendukung keberhasilan relokasi masyarakat tidak hanya dilihat dari nilai manfaat ekonomi dari lahan sebagai sumber mata pencaharian maupun akses pekerjaan baru namun perlu pula disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masyarakat. Dalam konteks Masyarakat di Kawasan Mandalika, karakteristik lahan yang memiliki fungsi diversifikasi penopang subsisten lebih penting dibandingkan orientasi mata pencaharian baru di tempat relokasi.

*Keempat*, karakteristik pekerjaan yang tersedia di kawasan belum berpihak pada kelompok rentan. Sebagian besar masyarakat terdampak merupakan masyarakat dalam kategori lanjut usia, janda, dan kelompok rentan lain dengan kapasitas keahlian, keterampilan, serta kondisi sosial yang belum kompatibel dengan peluang usaha di sektor pariwisata. Hal tersebut dikarenakan karakteristik mata pencaharian utama mereka sebelumnya lebih mengandalkan sektor agraris. Sedangkan fokus intervensi pemerintah lebih banyak diarahkan pada proses pembangunan infrastruktur dalam menunjang jalannya even di kawasan. Padahal kelompok ini memerlukan dukungan adaptasi ekonomi dalam bentuk penguatan kapasitas personal untuk bisa mengakses manfaat ekonomi tidak hanya dari sisi akses pekerjaan di kawasan namun juga kreatifitas dalam memanfaatkan peluang ekonomi baru dari aktivitas pariwisata yang sedang berkembang.

Ada kecenderungan di kalangan kelompok rentan merasa kondisi penghidupan mereka pasca relokasi diabaikan. Padahal pasca relokasi, terjadi perubahan orientasi ekonomi dan aktivitas sosial dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Keberadaan Sirkuit Mandalika maupun kawasan ekonomi khusus pada dasarnya telah membuka peluang kerja selektif bagi masyarakat lokal yang direlokasi. Pembangunan fisik dan pelaksanaan *event* di kawasan menghadirkan peluang lapangan kerja selektif yang memberi akses bagi masyarakat lokal yang memiliki modalitas pendidikan dan keahlian. Meskipun operasional kawasan yang ditandai dengan aktivitas pelaku usaha di kawasan yang semakin marak seiring dengan hadirnya sejumlah *event* namun kelompok rentan belum

mampu mengakses peluang kerja yang tersedia. Kelompok rentan seperti lanjut usia, janda dan masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai aktor non-ekonomi di kawasan cenderung terabaikan dan sulit memperoleh akses pada kegiatan ekonomi akibat belum kompatibel dengan jenis aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan.

Kelompok rentan memerlukan dukungan transformasi aktivitas ekonomi untuk dapat memperoleh manfaat dari keberadaan kawasan. Aktivitas ekonomi mereka yang sebelumnya dilakukan di lahan pertanian berdampak besar pasca di relokasi. Karakteristik ekonomi kelompok rentan prarelokasi menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi dalam pemanfaatan lahan. diversifikasi aktivitas ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan anggota keluarga dalam bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Dalam satu keluarga mereka bekerja saling menopang satu sama lain seperti suami menanam tanaman perkebunan di lahan sekaligus beternak, istri membuka warung di depan rumah, anak-anak menjual baju atau aksesoris keliling di sekitar pantai. Diversifikasi pekerjaan ini yang tidak terjadi pasca relokasi sementara. Sehingga dampaknya sangat besar bagi masyarakat lokal yang direlokasi.

### **Pandangan Institusional: Leave No One Behind but Economic Ecosystem First**

Sejak kebijakan pengembangan KEK bergulir, Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum maupun Kabupaten Lombok Tengah secara khusus telah memperoleh manfaat dalam hal terbangunnya berbagai infrastruktur wilayah dan infrastruktur kawasan baik berupa akses jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Hadirnya KEK Mandalika telah berdampak pada munculnya sejumlah proyek skala massif di kawasan seperti proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Proyek *Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project* (MUTIP), proyek dalam Program *Indonesian Tourism Development Project* untuk pembangunan Destinasi Super Prioritas serta program-program pemerintah lain yang diarahkan untuk meningkatkan nilai strategis dan ekonomis Kawasan Mandalika dalam aktivitas pariwisata nasional. Berbagai Program tersebut telah berhasil memberi nilai tambah atas daya tarik wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berlangsung sejak tahun 2017 di Kawasan Mandalika memberi manfaat besar bagi Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Lombok Tengah. Proyek tersebut belum termasuk dari pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam pembangunan kegiatan ekonomi pelaku usaha di kawasan. Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur kawasan menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, aktifitas pelaku usaha turut berkembang pesat di kawasan. Apalagi dengan hadirnya berbagai *event* internasional di kawasan membuat aktifitas pelaku usaha pariwisata di kawasan semakin berkembang.

Penelitian ini melihat bahwa fokus utama dalam kebijakan pengembangan Kawasan Mandalika masih berorientasi pada pengembangan infrastruktur kawasan untuk menunjang ekosistem usaha pariwisata. Saat ini intervensi yang dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah cenderung diarahkan dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung

aktivitas pelaku usaha di kawasan. Hal tersebut berdampak pada laju proses pembangunan ekonomi untuk mendukung ekosistem pelaku usaha pariwisata di kawasan melampaui laju pertumbuhan pembangunan sosial yang berada di tataran masyarakat lokal. Berbagai isu terkait pembangunan sosial seperti relokasi, pemberdayaan dan transformasi ekonomi masyarakat lokal cenderung tidak lebih diutamakan dibanding upaya-upaya yang berorientasi pada aktivitas pelaku usaha di kawasan.

Meskipun secara konsep proses relokasi sebagaimana tertuang dalam *Resettlement Policy Framework* telah mengadopsi prinsip *leave no one behind* dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Namun pada tataran praktiknya penelitian ini melihat bahwa laju pembangunan sosial dalam sejumlah isu masyarakat lokal termasuk kelompok rentan masih tertinggal dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menunjang pembangunan ekonomi di kawasan. Misalnya saja dalam pembangunan jalan kawasan khusus yang menjadi *venue* Balap Motor Internasional. Pemerintah bersama unsur sinergis Badan Usaha Pembangun dan Pengelola dapat membangun sirkuit dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Sedangkan masyarakat lokal yang direlokasi akibat pembangunan sirkuit tersebut setidaknya menghabiskan waktu 2-3 tahun tinggal di *Temporary Evacuation Shelter* sebelum dipindahkan di kawasan relokasi permanen.

Perbedaan laju pembangunan ekonomi dan sosial ini pula yang seringkali memantik munculnya isu-isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat lokal terdampak. Wacana pelanggaran HAM tersebut beberapa kali bergulir seperti laporan *United Nations Special Rapporteur* atau pelapor khusus PBB untuk masalah kemiskinan ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Olivier De Schutter di tahun 2021, laporan survei Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII) di tahun 2023 hingga yang terbaru laporan *Special Procedures Mandate Holders* (SPMH) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Media dan *Non-Government Organization* (NGO) di tahun 2024.

Sejumlah indikasi pelanggaran HAM sebagaimana dilaporkan oleh beberapa lembaga tersebut telah dengan tegas dibantah oleh pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Terkait masyarakat terdampak relokasi misalnya, Pemerintah Daerah menyatakan bahwa relokasi yang dilakukan merupakan contoh relokasi yang paling manusiawi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan salah seorang informan dari instansi pemerintahan berikut.

*“Menurut penilaian kami, relokasi ini adalah relokasi paling manusiawi. Semua masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pembangunan sirkuit mendapatkan bantuan perumahan meskipun mereka bukan pemilik lahan atau hanya pengguna lahan saja. Jadi kami dapat pastikan mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah dimukimkan kembali” (RP, Wawancara Juni 2024).*

Informasi yang diungkap oleh informan tersebut menunjukkan proses pemberian rumah tempat tinggal warga direlokasi yang diberikan kepada keseluruhan masyarakat lokal yang sebelumnya berada di kawasan sirkuit. Pemberian rumah relokasi dilakukan tidak hanya bagi pemilik tanah dan lahan namun juga bagi warga yang tidak memiliki lahan yang selama ini menempati lahan yang ada dalam HPL ITDC.

Penelitian ini melihat bahwa terdapat perbedaan konsepsi terkait proses relokasi yang melahirkan sejumlah pro dan kontra dalam diskursus masyarakat lokal khususnya kelompok rentan. Secara paradigmatik, proses pembangunan yang dilakukan cenderung berorientasi dalam menunjang aktivitas pariwisata di kawasan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dibandingkan pembangunan sosial. Dalam hal relokasi pemerintah melihat persoalan masyarakat lokal telah dilakukan dengan sangat baik mengacu pada pemberian rumah pemukiman bagi seluruh masyarakat lokal terdampak meskipun tidak memiliki lahan dan hanya sebatas pemanfaat lahan HPL yang dimiliki BUPP. Kendati demikian persoalan relokasi tidak dapat disimplifikasi sebagai persoalan pemukiman kembali namun harus disertai dengan upaya rehabilitasi dan dukungan transformasi perekonomian masyarakat lokal.

Untuk dapat memperluas dampak dan kontribusi sektor pariwisata diperlukan upaya-upaya transformasi kegiatan ekonomi di level masyarakat. Dalam hal ini, kelompok rentan harus menjadi salah satu obyek sekaligus subyek yang diperhatikan agar dapat terlibat dalam jaringan usaha pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aktivitas perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif. Kendati demikian, transformasi ekonomi tersebut memerlukan proses yang cukup panjang untuk dapat mendorong kapasitas sumberdaya pariwisata yang kompatibel dengan kegiatan utama pariwisata. Dilihat dari segi pengembangan lapangan usaha di sektor yang terintegrasi secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata khususnya pada level usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kebutuhan utama di Lombok Tengah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan adaptasi mata pencaharian kelompok rentan disebabkan adanya ketimpangan intervensi dalam transformasi ekonomi dan sosial masyarakat terdampak pembangunan KEK Mandalika. Isu terkait masyarakat lokal dari kelompok rentan seperti kelompok ekonomi lemah, janda, kelompok lanjut usia dan entitas di luar aktor ekonomi dan pelaku usaha di kawasan masih belum dipandang strategis. Perhatian dan intervensi lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam logika ekonomi hal tersebut dapat dipahami mengingat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Mandalika yang masih berada dalam tahap operasional tahap pertama masih memerlukan dukungan intervensi statisme negara dalam menggalang dan menarik minat investor dan pelaku usaha agar terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan. Namun demikian melihat situasi kelompok ekonomi lemah, janda dan lansia justru yang memiliki tantangan lebih besar tidak hanya dilihat dalam pemenuhan kebutuhan pemukiman namun juga dukungan intervensi dan kebijakan dalam mengatasi hambatan mata pencaharian dan beradaptasi terhadap perubahan aktifitas ekonomi pariwisata di kawasan. Apalagi dalam praktiknya, kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sebagaimana prinsip *leave no one behind*.

### **Daftar Pustaka**

Burns, P. M. (2008). Tourism, political discourse, and post-colonialism. *Tourism and Hospitality Planning & Development*, 5(1), 61-71.

- Cooper, C., Hall, C. M. (2016). *Contemporary Tourism: an International Approach*. Oxford: Goodfellow Publishers.
- Davidson, L., & Sahli, M. (2015). Foreign direct investment in tourism, poverty alleviation, and sustainable development: a review of the Gambian hotel sector. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(2), 167-187.
- Denzin & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Fallon, F. (2001). Conflict, Power and Tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>
- Fallon, F. (2010). Conflict, Power and Tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>
- Fallon, F. (2015, Juli). Beyond the Cina statistics- collaborating for tourism sustainability in Indonesia. *International Geographers' Union Tropical Tourism Outlook conference*. [www.igutourism.org/lombok2015.html](http://www.igutourism.org/lombok2015.html)
- Feng, X. (2008). Who benefits?: tourism development in Fenghuang County, China. *Human organization*, 67(2), 207-220.
- Gleckman, H. (2018). *Multistakeholder governance and democracy: A global challenge*. Routledge.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2015). Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia. *World Development*, 70, 481–495. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007>
- Iorio, M., & Corsale, A. (2013). Diaspora and tourism: Transylvanian Saxons visiting the homeland. *Tourism Geographies*, 15(2), 198-232.
- Işik, C. (2015). Foreign direct investment in tourism: Panel data analysis of D7 countries. *Athens Journal of Tourism*, 2(2), 93-103.
- Jiu-xia, S. U. N., & Tao, M. A. (2012). Relocalization and Delocalization of Ethnic Culture in Tourism Development: A Case Study of Naxi Yishang Community of Lijiang. *Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition)*, 4.
- Ketshabile, L., & Ferreira, I. W. (2009). Tourism policy and the economic impact of tourism in Botswana.
- Lora-Wainwright, A. (2014). Grassroots perspectives on relocation: threats and opportunities. *positions: east asia cultures critique*, 22(3), 661-689.
- Okello, M. M., & Novelli, M. (2014). Tourism in the East African Community (EAC): Challenges, opportunities, and ways forward. *Tourism and Hospitality Research*, 14(1-2), 53-66.
- Ou, Z., & Ma, G. (2017). Marginalisation of the Dan fishing Community and Relocation of Sanya fishing port, Hainan Island, China. *Island Studies Journal*, 12(2).
- Poloma, Margaret. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. Rajagrafindo.
- Ritzer, Dan Goodman. (2011). *Teori Marxis, dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. Dan Jeffrey, Stepnisky. (2019). *Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Rogerson, C. M., & Visser, G. (2011). African tourism geographies: existing paths and new
- Schellhorn, M. (2010). Development for whom? Social Justice And The Business Of Ecotourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1), 115–135. <https://doi.org/10.1080/09669580903367229>
- Schellhorn, M. (2012). Development for whom? Social justice and the business of ecotourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1), 115–135. <https://doi.org/10.1080/09669580903367229>

- Snyman, S. (2014). Assessment Of The Main Factors Impacting Community Members' Attitudes Towards Tourism And Protected Areas In Six Southern African Countries. *Koedoe: African Protected Area Conservation and Science*, 56(2), 1-12.
- Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2016). Heritage Tourism And Livelihood Sustainability Of A Resettled Rural Community: Mount Sanqingshan World Heritage Site, China. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(5), 735-757.
- Truong, V. D., Hall, C. M., & Garry, T. (2014). Tourism and poverty alleviation: Perceptions and experiences of poor people in Sapa, Vietnam. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(7), 1071-1089.
- Wasylycia-Leis, J. (2016). *Celebrating Community: Local Music Festivals and Sustainable Relocalization in Southern Manitoba*(Master's thesis, University of Waterloo).
- Wondirad, A., & Ewnetu, B. (2019). Community Participation In Tourism Development As A Tool To Foster Sustainable Land And Resource Use Practices In A National Park Milieu. *Land use policy*, 88, 104155.
- Zebryte, I., & Jorquera, H. (2017). Chilean Tourism Sector “B Corporations”: Evidence Of Social Entrepreneurship And Innovation. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*.